

“ANARKI” SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHKAN SUBSISTENSI DI PEDESAAN*

Oleh: Hotman M. Siahaan**

Aparat keamanan Jawa Timur mulai bertindak tegas terhadap para pelaku penjarahan sembako. Busari, 36, tersangka otak penggerak penjarahan sembako di Bondowoso, Sabtu (12/9) tewas ditembak petugas. Sementara di wilayah Kabupaten Malang, empat pelaku penjarahan peternakan ayam di Kecamatan Pakis, Minggu (13/9) juga mengalami luka-luka setelah ditembak aparat. Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 25 Agustus lalu terjadi aksi penjarahan beras dan sembako oleh massa di beberapa perusahaan penggilingan beras dan sejumlah toko di Bondowoso. Kerugian sekitar 500 ton beras. Aksi penjarahan di wilayah Kabupaten Malang makin meluas, ratusan massa bersenjata tajam dan balok kayu membobol dan menjarah dua perusahaan ayam petelor dan satu toko milik warga keturunan. Dalam aksi penjarahan itu aparat sempat kewalahan menghalau massa yang brutal. Tembakan peringatan berkali-kali tidak digubris. Massa malah mengejek-ejek petugas sambil berlomba-lomba memasukkan ayam dalam karung serta berebut membawa barang-barang milik korban seperti TV, HT, pakaian, springbed dan sebagainya.

(Surya, Senin, 14 September 1998)

Cuplikan berita di atas hanyalah salah satu reportase yang akhir-akhir ini menghiasi halaman surat kabar. Penjarahan di berbagai wilayah meluas, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di berbagai tempat lainnya, yang menunjukkan betapa seriusnya permasalahan. Aksi penjarahan juga melanda banyak perkebunan milik negara, seperti perkebunan kopi dan kakao milik PTPN XII di Kabupaten Malang, Jember, dan Situbondo. Ribuan hektar

* Artikel ini pernah dipresentasikan pada *Seminar* “Anarki, Represi, dan Demokrasi” yang diadakan dalam rangka Dies Fisipol UGM, 19 September 1998.

** Staf pengajar Fisip, Universitas Airlangga, Surabaya

tanaman perkebunan dibabat habis, kemudian penduduk mematok tanah-tanah tersebut untuk ditanami jagung dan kedelai. Penduduk mengklaim tanah perkebunan tersebut sebagai milik mereka yang selama rejim Orde Baru "dijarah" pemerintah melalui PTPN.

"Penjarahan" menjadi isu sentral dewasa ini, yang bermakna betapa meluasnya "anarki sosial" di masyarakat termasuk di pedesaan. Dalam upaya mengatasi meluasnya "anarki sosial" tersebut, aparat keamanan akhirnya bertindak represif dengan perintah tembak di tempat sebagaimana telah dilakukan di Jawa Timur. Efektifkah tindakan represif tersebut meredam aksi penjarahan dan tindakan "anarkis" rakyat yang dilanda krisis? Apakah "penjarahan" yang disebut-sebut sebagai "anarki" itu sesungguhnya bukan merupakan bentuk protes petani akibat "penjarahan" negara sepanjang rejim Orde Baru, atau sebagai upaya mempertahankan subsistensi?

"Anarki" Sebagai Protes Sosial Petani

Sepanjang sejarah kita menyaksikan protes sosial petani menentang dominasi ekonomi, politik, dan kultural yang "menindas", bukan saja protes sosial yang bersifat keagamaan, tetapi juga protes yang berupa kerusuhan. Beberapa bentuk kerusuhan sebagai bentuk protes sosial itu adalah "perkecuan" yang termasuk "perbanditan sosial" dalam pergerakan sosial. Juga "pembegalan" yang dianggap sebagai gangguan keamanan di pedesaan, khususnya di perkebunan tebu, tembakau, dan kopi. Tindakan ini merupakan protes sosial terhadap perusahaan perkebunan yang banyak merugikan petani. Bandit adalah seseorang atau kelompok yang menyerang dan merampok dengan kekerasan. Namun demikian, bandit ini dibedakan dari "bandit biasa" (*ordinary bandit*) atau "bandit sosial" (*social bandit*). Gerakan perbanditan dilakukan untuk menghilangkan ketidakadilan, penekanan, dan eksploitasi, merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib, dan tekanan sosial politik, dan bertujuan mengembalikan miliknya yang telah diserobot penguasa. Berdasarkan kesadaran politik, resistensi petani berupa perbanditan dapat dibedakan menjadi gerakan yang belum/tidak sadar politik (resistensi pra-politik); setengah sadar (resistensi quasi-politik); dan sadar politik (resistensi sadar politik). Resistensi yang belum/tidak sadar lebih didominasi oleh tindakan kejahatan semata-mata yang diwujudkan dalam pencurian, "begal",

dan sejenisnya. Resistensi setengah sadar dilakukan oleh individu atau kelompok yang diwujudkan dalam perampokan dan perkecuan, sedangkan resistensi yang sadar politik sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk gerilya, pemberontakan, dan sejenisnya. Perbanditan itu sendiri dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kriminalitas (*criminal bandit*), perbanditan (*banditry*), dan pemberontakan (*rebellion*) (Suhartono: 1995, 130-131).

Di dalam bukunya *Weapons of the Weak*, James C. Scott menguraikan betapa akibat meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui Revolusi Hijau, telah mengubah hubungan antara petani kaya dengan petani miskin, di mana yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tetap tinggal miskin, bahkan menjadi lebih miskin. Perubahan ini melahirkan berbagai bentuk perlawanan kaum lemah dalam menghadapi hegemoni kaum kaya maupun negara. Scott menunjukkan betapa petani miskin mampu membangun perlawanan terhadap hegemoni negara lewat penetrasi negara di dalam proses transformasi hubungan-hubungan produksi dengan mekanisasi dan modernisasi pertanian, dengan menyebutkan realitas itu sebagai *everyday forms of repression* yang dihadapi dengan *everyday forms of resistance* (James C. Scott: 1985, 241).

Semua itu bukanlah pemberontakan, tetapi lebih sesuai pada pengertian yang mungkin bisa dinamakan "perlawanan sehari-hari" petani, pergulatan yang prosais namun tetap, antara kaum tani dan mereka yang berusaha menghisap tenaga kerja, pangan, pajak-pajak, sewa-sewa, dan kepentingan mereka. Scott juga mengemukakan bahwa terdapat perbedaan perspektif antara perlawanan yang sungguh-sungguh di satu pihak dengan "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental bahkan epifenomenal di pihak lain. Perlawanan yang sesungguhnya bersifat (a) terorganisir, sistematis dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan atau (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sebaliknya, "tanda-tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal adalah (a) tidak terorganisir, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat untung-untungan atau "berpamrih" (nafsu akan kemudahan), (c) tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner, dan/ atau (d) dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada. Betapapun, tujuan sebagian besar perlawanan petani yang sekarang ini terjadi bukannya secara langsung menggulingkan atau mengubah sebuah sistem dominasi, melainkan lebih terarah kepada upaya

untuk tetap hidup dalam sistem yang berlaku sekarang ini. Biasanya tujuan kaum tani adalah menjalankan sistem demi kerugian minimal bagi dirinya (Scott: 1993: 271-302; 316).

Sebenarnya perlawanan petani tidak selalu mengambil bentuk aksi bersama, apalagi dalam bentuk protes terbuka. Selain itu, banyak aksi yang dimaksudkannya justru memukul balik — seperti pada aksi protes atau pemberontakan — dan membawa akibat-akibat yang sama sekali tidak diperhitungkan sebelumnya, dan perlawanan itu bisa mencakup apa yang disebut dengan perlawanan simbolis atau ideologis. Seolah-olah ada kiasan bahwa kelompok ekonomi lemah boleh menolak secara sama kasarnya terhadap kondisi-kondisi yang dijatuhkan oleh kelompok-kelompok dominan. Untuk masyarakat yang secara struktural posisinya tidak menguntungkan, *every forms of resistance* mungkin lebih berhasil dalam jangka pendek dan jangka panjang daripada merumuskan protes secara umum yang hanya layak dilakukan apabila resiko penyelesaiannya cukup besar. Perlawanan kaum lemah hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa koordinasi sama sekali, dan mereka menentang secara langsung norma-norma dan dominasi kaum elit. Perlawanan seperti ini mungkin saja menurunkan kewibawaan dan produktifitas pemerintah sehingga kelompok elit politik dan elit ekonomi merasa perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan yang berarti (Susan Eckstein: 1989, 8).

Meski tidak harus melalui cara-cara revolusioner sebagaimana dikemukakan Jeffrey M. Piage dalam *Agrarian Revolution*, di antara tipe-tipe organisasi agraris, sistem bagi hasil yang tidak terpusatkan paling mungkin untuk menuju ke arah revolusi agraris, karena adanya konflik antara kelas atas yang penghasilannya tergantung pada pengolahan tanah tidak mudah untuk menyesuaikan kepentingannya dengan kelas penanam yang juga sangat tergantung pada pengolahan tanah. Seandainya golongan penanam dapat diorganisasikan menurut pengelompokan kelas, kelas itu akan mudah digerakkan untuk gerakan revolusioner (Jeffrey M. Piage, 1975).

Terutama untuk daerah pertanian yang telah dikomersialkan, apalagi kalangan petani penggarap yang mengalami tekanan tanah, penduduk pedesaan akan lebih kritis untuk melakukan revolusi (Donald Zagoria: 1974, 29), dan sasaran revolusi itu adalah para tuan tanah, sebagaimana dikemukakan Barrington Moore. Bila dalam revolusi borjuis, elit tuan tanah berhasil

dihapuskan; kemudian dalam revolusi dari atas, elit tuan tanah mampu bertahan dan bahkan kemudian berhasil menaklukkan revolusi rakyat; maka dalam "revolusi petani" tipe ketiga, elit tuan tanah dapat ditundukkan oleh kaum tani. Kaum tani pula yang membuka jalan ke arah modernisasi. Faktor ideologi, politik masyarakat dan kebudayaan, kesemuanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan berfungsi sebagai mekanisme bagi golongan penguasa untuk membela kepentingannya. Dalam hal ini konflik kelas menjadi salah satu faktor penentu perkembangan sejarah, dalam pengertian bahwa kelas adalah pelbagai mekanisme yang digunakan elit untuk mengambil surplus ekonomi dari golongan masyarakat di bawahnya. (Barrington Moore: 1966, 3-39).

Dalam beberapa hal, kehidupan petani di pedesaan tidak dapat melepaskan diri dari hubungannya dengan dunia luar, seperti misalnya dalam hal ekonomi, sosial, budaya, tradisi. Namun demikian, kehidupan desa tidak tertutup sama sekali dari pengaruh luar, misalnya dalam partisipasi politik. Faktor yang mendorong partisipasi petani ini antara lain buruh upahan dari luar, mekanisme pemasaran barang, serta keterlibatannya dalam ekonomi uang. Hubungan keluar memperluas ikatan-ikatan dengan lembaga-lembaga di lingkungan supra-desa, sehingga mereka dapat membebaskan diri dari kekuasaan kontrol-kekuatan yang terarah ke dalam. (Joel S. Migdal: 1979, 233-236).

Perlawanan kaum tani sesungguhnya berlangsung sepanjang sejarah, baik melalui hubungan antara yang kaya dengan yang miskin, maupun hubungan kaum tani dengan pemerintah, apalagi di masa kolonial sebagai akibat dari meluasnya perkebunan tebu dan hadirnya pabrik-pabrik gula di Jawa sebagaimana dilukiskan dengan bagus oleh Jan Breman (Breman, 1983).

Struktur sosial merupakan konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan dan prestise, yang menimbulkan perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda secara berjenjang. Mereka yang menguasai sarana pemaksa fisik dan sarana produksi kekayaan akan memiliki kekuasaan untuk menguasai mereka yang tidak memilikinya. Kekuasaan tersebut mencakup baik ide maupun penguasaan atas sumber daya material. Apabila petani atau orang-orang miskin memberontak, hal tersebut tidak berarti bahwa mereka secara intrinsik pada dasarnya dilahirkan untuk membuat kerusuhan. Mereka memberontak karena terbatasnya berbagai sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka

terhadap perubahan. Sekalipun petani tampaknya pasif, sungkan, dan diam, mereka dapat saja menolak kondisi-kondisi yang tidak mereka sukai melalui pengurangan produksi, atau tidak mengindahkan informasi-informasi penting dari para penindasnya. Bentuk perlawanan secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum dilakukan daripada melawan secara terang-terangan. Para petani biasanya bersedia mengambil resiko dengan mengadakan konfrontasi langsung apabila mereka menganggap ketidakadilan tidak lagi dapat ditolerir, apabila tuntutan untuk kebutuhan mereka melonjak secara tiba-tiba, dan apabila institusi lokal dan nasional serta kondisi kultural cenderung meminta mereka untuk menggunakan jubah kolektif (Susan Ekstein: 1989, 3-15).

"Anarki Sosial" dan Pergolakan Petani

Upaya untuk menjelaskan timbulnya protes petani dapat dilihat dalam tiga faktor. Pertama, akibat meluasnya komersialisasi pertanian yang mengakibatkan merosotnya keamanan ekonomi petani, terbongkarnya hubungan-hubungan sosial pedesaan, dan melemahnya nilai-nilai tradisional. Kedua, faktor pembentukan organisasi politik yang berasal dari luar masyarakat petani yang mengembangkan tuntutan bantuan sumber daya ekonomi, perlindungan, keahlian organisasi, dan sistem nilai baru. Ketiga, respons negara, khususnya perpaduan dari pilihan antara reformasi dan penindasan yang menimbulkan dampak penting pada lingkup dan intensitas mobilisasi petani.

Masing-masing faktor yang dikemukakan di atas merupakan faktor penting di dalam memahami "anarki sosial" petani saat ini. Tidak dapat dipungkiri pada dasarnya transformasi agraria dalam bentuk apapun (terutama revolusi hijau di masa Orde Baru) telah menimbulkan marginalisasi khususnya kepada petani miskin. Kini, faktor penting dari perlawanan mereka adalah serbuan pada keamanan ekonomi mereka. Sebagai salah satu faktor, "krisis subsistensi" ini sangat dekat dengan pemahaman Scott yang menjelaskan perlawanan petani dalam konsep *weapons of the weak*, meskipun pemahaman tersebut belum cukup untuk memahami meluasnya "penjarahan" petani seperti yang terjadi hari-hari terakhir ini. Apa yang membedakannya adalah peranan penting yang dimainkan oleh faktor-faktor politik, khususnya era reformasi sekarang ini.

Peranan paling penting dari kekuatan politik baru tersebut adalah gelombang reformasi yang membangkitkan kesadaran politik masyarakat desa. Dengan kemudahan akses dan besarnya legitimasi era reformasi dibanding aktor-aktor lainnya, membuat masyarakat memiliki keyakinan yang sama untuk mempertanyakan keabsahan kebijakan negara yang selama tiga dasawarsa hampir tidak mungkin mereka lakukan. Masyarakat desa tidak sekedar mempertanyakan kembali keabsahan para petinggi desa, bahkan menuntut mereka mundur dari jabatan. Di banyak wilayah di Jawa Timur, misalnya, upaya para aktivis reformasi desa ini telah berhasil meruntuhkan nilai-nilai dan hubungan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat petani selama ini bersikap pasif. Baik melalui upaya-upaya yang secara langsung bersifat "kekerasan" ataupun yang bersifat politis, mereka seringkali berhasil mengubah sikap-sikap arogan para penguasa menjadi lebih "reformis". Situasi itu telah menciptakan hubungan baru antara rakyat dengan penguasa negara. Akibatnya, para petani di berbagai wilayah berubah. Didukung oleh proses yang demikian, mereka memelopori tuntutan akan hak-hak hidup mereka secara lebih baik, berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi, membentuk batas-batas wilayah tanah dan melakukan penyerbuan atas tanah-tanah (Charles D. Brockett: 1990, 192).

Apabila upaya-upaya reformasi ini dipadukan dengan krisis subsistensi yang melanda kehidupan masyarakat pedesaan, hasilnya adalah mobilisasi maha penting oleh para petani di dalam upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki posisi hidup mereka, meskipun harus melalui penjarahan dan tindakan yang dikategorikan sebagai "anarki". Hasil nyata dari semua itu sangat tergantung kepada bentuk-bentuk respons penguasa terhadap "ancaman rakyat" tersebut. Nyatanya sikap pemerintah memiliki banyak spektrum, mulai dari sikap yang permisif, preventif, atau represif, termasuk perintah tembak di tempat yang sudah dilaksanakan di Jawa Timur.

Dalam bukunya *Why Men Rebel*, Ted Gurr mengembangkan teori umum yang didasarkan atas teori psikologi terhadap jarak dan bentuk "kekerasan politik", yang didefinisikannya sebagai:

"... semua serangan kolektif dalam suatu komunitas politik terhadap rejim politik, para aktor politiknya, termasuk kelompok-kelompok politik yang bersaing, para pejabat atau kebijakan-kebijakannya. Konsep itu menggambarkan adanya seperangkat peristiwa, penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan secara bersama. Konsep itu termasuk revolusi ... termasuk juga perang gerilya, kudeta, pemberontakan, dan kerusuhan" (Ted Gurr: 1970, 3-4).

Bagi Ted Gurr, kekerasan politik terjadi ketika masyarakat menjadi marah, khususnya jika kondisi praktis dan kondisi budaya yang ada merangsang terjadinya agresi terhadap sasaran-sasaran politik. Orang akan marah apabila terdapat jurang pemisah antara barang-barang berharga dan kesempatan yang mereka anggap sebagai haknya yang sebenarnya — suatu kondisi yang dikenal sebagai deprivasi relatif. Gurr menawarkan model khusus untuk menjelaskan berbagai bentuk kekerasan politik yang utama. Ia membedakan antara kekacauan (*turmoil*), persengkongkolan (*conspiracy*), dan perang saudara (*internal war*) sebagai bentuk-bentuk yang utama. Revolusi termasuk dalam kategori *internal war*, bersama-sama dengan terorisme kelas kakap, perang, dan perang sipil. Satu hal yang menyebabkan *internal war* dibedakan dari bentuk lainnya adalah bahwa *internal war* lebih terorganisir dibandingkan *turmoil*, dan lebih berbasis massa dibanding *conspiracy*. Oleh karena itu, dalam pikiran Gurr, sangat beralasan jika revolusi harus diterangkan dari adanya deprivasi relatif yang hebat, meluas, dan menyangkut berbagai segi kehidupan (*multifaceted*) yang menyentuh baik para calon elit maupun massa rakyat (Skocpol: 1991, 7); Ted Gurr: 1970, 334-347).

Penjelasan lain atas terjadinya "anarki" di pedesaan dewasa ini, di samping sebagai akibat runtuhnya kekuatan ekonomi petani dan melemahnya dasar-dasar masyarakat pedesaan yang memicu terjadinya radikalisme, juga didorong oleh pertumbuhan pasar dan kekuatan negara melalui perkebunan untuk mengekstraksi surplus dari petani-petani miskin — sebagaimana dialami petani di Jenggawah Jember, di Banongan Situbondo, di Raci Pasuruan, di Simojayan Malang, dan lain-lain. Tingginya derajat eksploitasi itulah yang mendorong lapisan petani miskin untuk melakukan klaim atas tanah yang mereka anggap sebagai miliknya namun "dijarah" oleh rejim Orde Baru.

Menurut Lichbach, ada tiga bentuk pergolakan yang berbeda yang terjadi di masyarakat petani, yaitu bentuk perlawanan sehari-hari (*everyday forms of peasant resistance*), protes tak terorganisir (*unorganized rural movements*), dan pemberontakan terorganisir (*organized peasant rebellions*) (Lichbach: 1994, 386). Dalam pandangan Lichbach, petani hanya mau ikut dalam tindakan perlawanan kolektif, pemberontakan, atau revolusi jika mereka merasa akan mendapatkan keuntungan di masa depan, atau apa yang dinamakan sebagai *selective incentives*. Pada dasarnya para petani selalu berteori secara amat rasional dalam memutuskan keterlibatannya pada gerakan kolektif. Adapun *selective incentives* yang diperoleh para petani akan

menentukan taktik dan strategi mereka dalam melakukan pembangkangan, baik dalam bentuk perlawanan sehari-hari, protes tak terorganisir, maupun pemberontakan terorganisir.

Menurut Lichbach, kaitan perjuangan petani dalam hubungannya dengan *selective incentives* yang diterimanya mewujud dalam bentuk *everyday forms of peasant resistance* atau *weapons of the weak* (senjata kaum lemah). Para petani banyak melakukan strategi ini ketika mereka terlibat di dalam konflik dengan para tuan tanah — misalnya, menyangkut sistem upah, perlngkapan kerja, atau sistem irigasi; atau terhadap negara — misalnya yang menyangkut pajak, kemampuan sumbangan kekayaan, kemampuan persyaratan kerja. Strategi ini lahir dari anggapan tentang eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam menggunakan *everyday forms of peasant resistance*, petani berupaya untuk memanipulasi sistem guna memaksimalkan keuntungan secara material bagi dirinya. Colburn menyebut tindakan petani tersebut sebagai "rasional, tetapi dengan kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kesejahteraan orang-orang miskin di desa", dan petani bekerja dengan sistem untuk memaksimalkan keuntungan, atau menurut istilah Hobsbawan, meminimumkan kerugian. "Senjata" ini dapat bersifat material ataupun ideologis (Lichbach, 1994, 393).

Terdapat berbagai macam teknik atau cara-cara dalam kategori bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari maupun protes tak terorganisir, sebagai upaya petani untuk mendapatkan *selective incentive*, seperti "penjarahan", pendudukan massal atas tanah, pembabatan tanaman perkebunan, penjarahan tambak, ataupun merampok hasil panen atau sembako (yang juga termasuk dalam kategori *social banditry*). Tindakan-tindakan yang disebut "anarki" tersebut pada dasarnya belum mencapai tahap *organized rural rebellions*, salah satu bentuk pemberontakan desa yang terorganisir, yang bisa juga mencakup tentara gerilya atau tentara gerilya petani.

Catatan Penutup

Berbagai eksplanasi di atas memiliki banyak limitasi yang cukup menonjol. Sejumlah daftar pertanyaan yang bisa diajukan misalnya: di bawah kondisi apakah *selective incentives* yang bersifat material menjadi sentral dalam perjuangan petani? Kapan dan di mana hal-hal yang bersifat non material

dan altruistik menjadi titik berat yang menonjol? Di bawah kondisi apakah *selective incentives* yang bersifat material akan efektif memobilisasi petani untuk melakukan pembaharuan atau revolusi? Kapan dan di mana insentif tersebut menjadi *counter-productive* atau merugikan kehidupan para petani itu sendiri? Jawaban atas daftar pertanyaan tersebut memang mengundang perdebatan yang cukup kompleks.

Namun, dari berbagai eksplanasi di atas, terdapat satu benang merah yang bisa digunakan sebagai asumsi dasar dalam melihat protes sosial petani, yakni bahwa tuntutan subsistensi yang mereka ajukan tidak pernah cukup untuk dipakai sebagai *selective incentives* untuk memulai suatu pemberontakan petani, atau katakanlah tindakan "anarki" sebagaimana disebut akhir-akhir ini. Untuk menjadi efektif, *selective incentives* harus dikaitkan dengan himbauan-himbauan yang bersifat ideologis. *Selective incentives* tanpa ideologi politik hanya akan bersifat *counter-productive* dan dengan mudah akan diredam melalui tindakan represif, sebagaimana dijalankan oleh aparat keamanan dalam upaya mengatasi "anarkisme sosial" yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Daftar Pustaka

- Breman, Jan, *control of Land and Labour in Colonial Java*, Holland: Foris Publications, 1983.
- Brockett, Charles D., *Land, Power and Poverty: Agrarian Transformation in Central America*, London: Unwin Hyman, 1990.
- Eckstein, Susan, ed, *Power and Popular Protest: Latin American Social Movement*, Barkeley: University of California Press, 1989.
- Gurr, Tedd Robert, *Why Men Rebel*, Princeton: Princeton University Press, 1970.
- Lichbach, Mark I., "What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dillema, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action", dalam *World Politics* 46.
- Migdal, Joel, *Peasants Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 1979.

dan altruistik menjadi titik berat yang menonjol? Di bawah kondisi apakah *selective incentives* yang bersifat material akan efektif memobilisasi petani untuk melakukan pembaharuan atau revolusi? Kapan dan di mana insentif tersebut menjadi *counter-productive* atau merugikan kehidupan para petani itu sendiri? Jawaban atas daftar pertanyaan tersebut memang mengundang perdebatan yang cukup kompleks.

Namun, dari berbagai eksplanasi di atas, terdapat satu benang merah yang bisa digunakan sebagai asumsi dasar dalam melihat protes sosial petani, yakni bahwa tuntutan subsistensi yang mereka ajukan tidak pernah cukup untuk dipakai sebagai *selective incentives* untuk memulai suatu pemberontakan petani, atau katakanlah tindakan "anarki" sebagaimana disebut akhir-akhir ini. Untuk menjadi efektif, *selective incentives* harus dikaitkan dengan himbauan-himbauan yang bersifat ideologis. *Selective incentives* tanpa ideologi politik hanya akan bersifat *counter-productive* dan dengan mudah akan diredam melalui tindakan represif, sebagaimana dijalankan oleh aparat keamanan dalam upaya mengatasi "anarkisme sosial" yang terjadi beberapa waktu yang lalu.

Daftar Pustaka

- Breman, Jan, *control of Land and Labour in Colonial Java*, Holland: Foris Publications, 1983.
- Brockett, Charles D., *Land, Power and Poverty: Agrarian Transformation in Central America*, London: Unwin Hyman, 1990.
- Eckstein, Susan, ed, *Power and Popular Protest: Latin American Social Movement*, Barkeley: University of California Press, 1989.
- Gurr, Tedd Robert, *Why Men Rebel*, Princeton: Princeton University Press, 1970.
- Lichbach, Mark I., "What Makes Rational Peasants Revolutionary? Dillema, Paradox, and Irony in Peasant Collective Action", dalam *World Politics* 46.
- Migdal, Joel, *Peasants Politics and Revolutions Pressure to World Political and Social Change in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 1979.

- Moore Jr, Barrington, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston: Beacon Press, 1966.
- Paige, Jeffrey M., *Agrarian Revolution: Social Movement and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, New York: The Free Press, 1975.
- Skocpol, Theda, *Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia, dan Cina*, diterjemahkan oleh Kelompok Mitos, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Scott, James C., *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- , *Weapons of the Weak: Everuday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press, 1985.
- , *Perlawanan Kaum Tani*, Jakarta: YOI, 1993.
- Suhartono, *Bandit-bandit di Pedesaan Jawa: Studi Historis, 1850-1942*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Zagoria, Donald, "Asian tenancy Systems and Communist Mobilization of Pesantry" dalam Jhon Lewis, ed, *Peasant and Communist Revolutions in Asia*, California: Stanford University Press, 1974.

Harian *SURYA*, Senin 14 September 1998.